

Judul : Setelah DPR Setuju
Tanggal : Jumat, 21 Juni 2013
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

SISI LAIN SENAYAN

Setelah DPR Setuju

"Santai saja, Bro." Demikian pesan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq untuk Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, yang juga anggota Majelis Syura PKS.

Pesan itu disampaikan Mahfudz, Rabu (19/6), terkait pertanyaan Tifatul atas sikap partainya yang menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Penolakan PKS dalam Rapat Paripurna DPR, Senin lalu, kembali mengulang wacana untuk mengeluarkan PKS dari koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau setidaknya mengurangi jatah menteri partai itu di kabinet.

Disebut kembali mengulang karena wacana serupa pernah muncul beberapa kali, misalnya dalam kasus Bank Century tahun 2010, usulan angket mafia pajak tahun 2011, dan rencana kenaikan harga BBM tahun 2012.

Selama ini, harga terbesar yang pernah dibayar PKS akibat sikapnya adalah dikurangnya jatah menteri dari empat menjadi tiga saat perombakan kabinet Oktober 2011. Ketika itu, posisi kader PKS, Suharna Surapranata, sebagai Menteri Riset dan Teknologi diganti Gusti Muhammad Hatta, seorang profesional.

Melihat pengalaman itu, imbauan "santai saja, bro" dari Mahfudz itu mungkin perlu dipikirkan. Apalagi ada hal lain yang tak kalah menarik pada APBN-P 2013, yaitu anggaran Rp 29,05 triliun untuk lima program kompensasi dari kenaikan harga BBM. Salah satu program itu adalah bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp 9,3 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga miskin.

Mereka yang bertarung pada Pemilu 2014 dapat "menumpang" anggaran itu untuk membantu memenangkan pertarungan tanpa perlu melanggar hukum formal. "Anggota DPR yang akan kembali bertarung pada Pemilu 2014 dapat mengklaim dana itu hasil perjuangan mereka. Caleg juga dapat menjual informasi kepada penerima, misalnya memberi tahu kapan harus mengambil dana kompensasi itu," kata anggota DPR dari PDI-P, Hendrawan Supratikno.

Caleg yang bernyali "lebih" dapat mengumpulkan para penerima dana kompensasi, misalnya di tingkat desa. Selain diisi dengan sejumlah nasihat, seperti bagaimana menggunakan dana itu dengan bijak, dalam pertemuan tersebut juga dapat diselipkan pembekalan politik.

Cara lain yang lebih murah, pesan itu dapat disampaikan lewat surat yang dikirimkan kepada para penerima dana kompensasi. Surat ini tentu harus disertai identitas lengkap pengirim, seperti nama, asal partai, daerah pemilihan, dan nomor urut pada Pemilu 2014.

Agaknya sebagian penerima dana kompensasi perlu bersiap menerima surat ini. Pasalnya, bisik-bisik di Kompleks Parlemen, Jakarta, sejumlah legislator yang akan kembali maju pada Pemilu 2014 telah berencana mengirimkannya. (M HERNOWO)

